

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 19
TAHUN 2005 DALAM PENERAPAN MANAJEMEN
BERBASIS SEKOLAH DI SD NEGERI 2
BLANG NISAM**

SKRIPSI

Oleh:

SINDI WIRANDA

NPM : 1503100152

Program Studi Ilmu Administrasi Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **SINDI WIRANDA**
N P M : 1503100152
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NO 19 TAHUN 2005 DALAM PENERAPAN
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SD
NEGERI 2 BLANG NISAM**

Medan, 18 Maret 2019

Pembimbing


IDA MARTINELLY, SH., MM

Disetujui Oleh,
KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

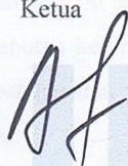
Nama Mahasiswa : **SINDI WIRANDA**
N P M : 1503100152
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Sabtu, 23 Maret 2019
Waktu : Pukul 07.45 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Drs. R. KUSNADI, M.AP** (.....)
PENGUJI II : **Drs. BANGUN NAPITUPULU, M.Si** (.....)
PENGUJI III : **IDA MARTINELLY, SH., MM** (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Sekretaris



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, Sindi Wiranda, NPM 1503100152, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 01 Maret 2019

Yang menyatakan,



Sindi Wiranda

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SD Negeri 2 Blang Nisam

**Sindi Wiranda
1503100152**

Abstrak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu konsep manajemen dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan otonomi luas pada sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SD Negeri 2 Blang Nisam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 dalam penerapan manajemen berbasis sekolah di SD Negeri 2 Blang Nisam belum terlaksana dengan baik, tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai disebabkan lemahnya pemahaman guru dan kepala sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah. Program yang dilaksanakan dalam kemandirian sekolah belum maksimal, karena sekolah mengalami kekurangan guru, sarana dan prasarana yang belum terpenuhi. Partisipasi di sekolah masih lemah walaupun sudah dibentuk komite sekolah, keterbukaan sekolah belum maksimal, hal ini terlihat pihak sekolah jarang melaksanakan rapat yang berkenaan dengan informasi terkait program sekolah. Akuntabilitas sekolah sudah cukup baik dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan ke dinas pendidikan dan interaksi dengan organisasi lain masih lemah, hal ini terlihat sekolah melakukan interaksi dengan pengawas dan dinas pendidikan, tidak ada lembaga atau organisasi lain. Pedoman atau aturan-aturan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah sudah dijalankan semaksimal mungkin dan sudah diterapkan oleh pihak sekolah. Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah ini terdapat hambatan yang terjadi yaitu tidak adanya sosialisasi dari dinas pendidikan ke pihak sekolah.

Kata Kunci: Implementasi dan Manajemen Berbasis Sekolah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kabar kepada manusia bahwa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam penelitian skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyusunan data guna menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SD Negeri 2 Blang Nisam”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian dari penelitian ini masih belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis sangat senang menerima saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang paling teristimewa Kedua Orangtua, kepada Ayahanda tersayang Wardo dan Ibunda tercinta Anita, S.Pd yang telah memberikan banyak dukungan, doa, dukungan moril maupun materil dari awal sampai akhir perkuliahan penulis, serta kepada saudara-saudari Hendriansyah, Herdanisa Rahayu, Tria Imelda, Suci, Wilda Riski yang selalu memberi doa dan dukungan terhadap penulis.
2. Bapak Drs. Agussani, M,AP. Selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip., M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yaitu Ibunda Ida Martinelli SH.,MM yang telah memberikan arahan dan kesempatan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Dosen dan seluruh Staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Para narasumber yang disertakan di dalam penelitian ini.

9. Untuk sahabat-sahabat tercinta sekaligus sahabat seperjuangan penulis selama di perkuliahan Cici Mualimah, Desmilan Amelia Lubis, CintaTri Haidijati, Niken Hafizah, Nurwahyu Yuliani, Ira Ariyanti.
10. Kepada teman-teman seperjuangan selama perkuliahan berlangsung hingga selesainya perkuliahan yaitu Inggit Dayanti, Dina, Rahmadani,, Kamal, Adrian, Nitra, Geby
11. Untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa/i stambuk 2015 yang tergabung dalam jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

Sindi Wiranda
1503100152

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penelitian	5
BAB II URAIAN TEORITIS	7
2. Konsep Implementasi kebijakan Publik	7
2.1.1 Implementasi	7
2.1.2 Kebijakan	9
2.1.3 Kebijakan Publik	11
2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik	17
2.2 Manajemen Berbasis Sekolah.....	20
2.3 Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah	28
2.4 Strategi Manajemen Berbasis Sekolah	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Kerangka Konsep.....	33
3.3 Definisi Konsep	34
3.4 Kategorisasi	35
3.5 Narasumber.....	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data	37
3.7 Teknik Analisia Data.....	37
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	38
3.9.1 Sejarah Singkat SD Negeri 2 Blang Nisam	38
3.9.2 Visi dan Misi SD Negeri 2 Blang Nisam.....	39
3.9.3 Struktur Organisasi	40
3.9.4 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Sekolah	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Hasil penelitian	45
4.2 Pembahasan	57
BAB V PENUTUP	61
5.1 Simpulan.....	62
5.2 Saran.....	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Fasilitas Sekolah di SD Negeri 2 Blang Nisam.....	45
Tabel 4.2 Status SD Negeri 2 Blang Nisam.....	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	33
Gambar 3.2 Struktur Organisasi SD Negeri 2 Blang Nisam.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	:SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: SK-10 Undangan/ Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran IX	: Surat Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran X	: Surat Keterangan Riset Penelitian Mahasiswa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan di Indonesia pada awalnya menerapkan sistem sentralisasi yaitu melimpahkan seluruh urusan pendidikan kepada pemerintah pusat. Dalam sistem tersebut sekolah tidak diberikan wewenang yang lebih luas untuk mengambil keputusan. Dengan menganut sistem sentralisasi tersebut pendidikan di Indonesia dinilai sangat kaku dan sentralistik. Maka dari itu pemerintah berupaya untuk mengubah sistem pendidikan di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi di bidang pendidikan. Sistem desentralisasi di bidang pendidikan telah memberikan peluang kepada sekolah untuk meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Tujuan pemerintah memberlakukan otonomi daerah di bidang pendidikan yaitu untuk menjadikan lembaga pendidikan formal dapat mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah di bidang pendidikan pemerintah berupaya dan bertekad untuk memberdayakan sekolah di seluruh jenjang pendidikan. Maka dari itu, semua urusan dan wewenang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota, bahkan dapat diserahkan langsung kepada sekolah itu sendiri. Dalam hal ini, sekolah harus mampu memberdayakan sumber dayanya dengan meningkatkan kegiatan manajemen sekolah yang efektif dan efisien.

Namun pada kenyataannya banyak sekolah yang mengalami kendala dalam melaksanakan manajemen sekolah. Hal tersebut menjadi faktor penghambat untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Tanggung jawab sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan harus dimulai dari memperbaiki sistem manajemen sekolah. Salah satu cara untuk memperbaiki untuk memperbaiki buruknya sistem manajemen sekolah yaitu dengan mengimplementasikan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional yang menjadi kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada pasal 49 yang berbunyi “Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”. Kini satuan pendidikan harus dapat bertanggung jawab untuk dapat mengurus dirinya sendiri, melalui mekanisme yang dikenal dengan Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MBS).

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik bagi peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.

Implementasi MBS diharapkan mampu menemukan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan. Warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan harus bergerak aktif untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah. Selain itu, partisipasi orang tua maupun masyarakat sekitar juga harus terlibat secara aktif dalam membantu pelaksanaan manajemen sekolah. Jika kegiatan manajemen sekolah berjalan baik secara terus menerus tentu akan berdampak positif bagi warga sekolah dan juga meningkatnya mutu pendidikan sekolah.

Dalam memperbaiki sistem manajemen sekolah, SD Negeri 2 Blang Nisam mulai menerapkan MBS. Tujuan SD Negeri 2 Blang Nisam mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Dengan adanya MBS, SD Negeri 2 Blang Nisam ingin menciptakan suasana dan kondisi sekolah yang mandiri, transparan, akuntabel, dan memiliki hubungan kerja sama yang kuat baik secara internal dan eksternal.

Kendatipun MBS telah diterapkan di sekolah, namun secara realita di lapangan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil kajian lapangan ditemukan permasalahan dalam implementasi MBS di sekolah, diantaranya yaitu partisipasi komite sekolah masih lemah, komite sekolah belum berperan aktif untuk ikut dalam melaksanakan program sekolah, lemahnya pemahaman warga sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah yang menekankan pada aspek kemandirian, kerjasama atau kemitraan, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Dengan mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) diharapkan mampu mewujudkan pendidikan yang bermutu melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang teredia, meningkatkan partisipasi warga sekolah (komite sekolah), adanya hubungan kemitraan yang kuat dan juga terciptanya sekolah yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan program sekolah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SD Negeri 2 Blang Nisam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SD Negeri 2 Blang Nisam?”

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi masalah yang hanya berkaitan dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SD Negeri 2 Blang Nisam.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SD Negeri 2 Blang Nisam.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dalam penerapan MBS di SD Negeri 2 Blang Nisam.
- b) Secara Praktis, memberikan kontribusi bagi SD Negeri 2 Blang Nisam.
- c) Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya dalam rangka memperkaya literature bacaan dan khasanah penelitian bagi mahasiswa.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini terdiri dari konsep Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah, Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah, Strategi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1 Implementasi

Wahab (2001 : 68) mengemukakan implementasi adalah keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan bahan peradilan. Keputusan tersebut haruslah mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan, dan menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam mengatur proses implementasinya. Dimana proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan-tahapan tertentu, yang diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, lalu output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, baik yang dikehendaki ataupun yang tidak dikehendaki, dari output tersebut, maka dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, Lalu dilakukanlah perbaikan yang lebih baik.

Menurut Dunn (2003 : 132) implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Secara lebih khusus, menurutnya implementasi kebijakan (Policy

Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

Winarno (2012 : 148) implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat untuk membuat program berjalan. Dan menurut mereka implementasi mencakup banyak kegiatan:

- a. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasinya berjalan lancar.
- b. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan kongkret, regulasi serta rencana dan desain program.
- c. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.
- d. Badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada pelanggan atau kelompok-kelompok target.

Menurut Wahab (2005 : 135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Guntur (2004 : 39) implementasi adalah suatu perluasan yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

2.1.2 Kebijakan

Menurut Winarno (2010 : 21) menjabarkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif.

Menurut Dye (2005 : 17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut Dunn (2003:20) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan pengadilan kriminalitas dan pengembangan perkantoran.

Menurut Abidin (2004 : 45) kebijakan sebagai suatu sistem yang terdiri dari atas sub sistem atau elemen, komposisi dari suatu kebijakan dapat di lihat dua perspektif yaitu dari proses kebijakan dan struktur kebijakan. Dari sisi struktur kebijakan terhadap lima unsur yaitu :

- a. Unsur pertama, tujuan kebijakan telah di pahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan itu. Perbedaan terletak tidak sekedar pada jangka waktu mencapai tujuan dimaksud, tetapi juga ada posisi, gambaran, orientasi dan dukunganya. Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria: diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis (*rational or realistic*), jelas (*clear*), dan berorientasi ke depan (*future oriented*).
- b. Unsur kedua, masalah atau sering disebut dengan isu sangatlah penting bagi suatu kebijakan. Kesalahan dalam menentukan suatu masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dari seluruh proses kebijakan.
- c. Unsur ketiga, demand atau yang disebut dengan tuntutan atau tantangan atau sebuah kritik atau seperti halnya partisipasi pada umumnya. Tuntutan dapat bersifat moderat atau radikal tergantung pada urgensi suatu tuntutan.

- d. Unsur keempat, dampak atau outcome, dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Sesuai dengan ciri kebijakan yang dapat bersifat positif atau negative, dampak yang ditimbulkan juga dapat bersifat positif dan negatif.
- e. Unsur kelima, Sarana atau alat kebijakan (*policy instruments*). Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana yang dimaksud. Beberapa dari sarana ini antara lain: kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan kebijakan itu sendiri. Kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu.

Menurut Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain dan kebijakan adalah suatu strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan.

2.1.3 Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2004 : 07) kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan “what goverment do or not to do”

kebijakan dari pemerintah yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Sebuah sistem kebijakan diciptakan memiliki fungsi-fungsi yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat demi kelancaran kebijaksanaan ekstra aktif, distributif dan menjamin hak asasi warga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah ataupun kelompok yang dominan di masyarakat.

Menurut Mulyadi (2015 : 3) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait, yang dilakukan oleh pemerintah dengan stakeholder dalam mengatur, mengelola, dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik.

Menurut Wahab (2014 : 20) kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat pemerintah mempunyai beberapa karakteristik kebijakan yaitu:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sengaja yang dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu dari pada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (at random), asal-asalan, dan serba kebetulan.
- b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.

- c. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif.

Menurut Solly (2007:9) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Dwijowijoto (2003 : 128) macam-macam kebijakan publik dapat di bagi menjadi dua yaitu :

- 1) Kebijakan publik yang dilihat dari pembuatnya.
 - a. Pusat : Pada kebijakan ini dibuat oleh suatu pemerintah atau lembaga negara yang berada di pusat untuk mengatur semua warga negara dan seluruh wilayah Indonesia.
 - b. Daerah : Pada Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah atau suatu lembaga daerah untuk mengatur suatu daerahnya masing-masing.
- 2). Kebijakan publik menurut sifatnya
 - a. Kebijakan umum ekstraktif, merupakan penyerapan sumber-sumber materil dan sumberdaya manusia yang ada di masyarakat. Seperti pemungutan pajak dan tarif iuran dan retribusi dari masyarakat, dan pengeolaan sumberdaya alam yang terkandung dalam wilayah negara.
 - b. Kebijakan umum distributive, merupakan pelaksanaan distributif dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat.

- c. Kebijakan umum regulatif, merupakan pengaturan perilaku anggota masyarakat. Kebijakan umum yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para penyelenggara pemerintah negara.

Menurut Mustopadidjaja (2002: 57) Suatu kebijakan publik memiliki mekanisme yang sistematis, yang harus dilakukan secara tahap demi tahap untuk mendapatkan suatu kebijakan publik yang sesuai dengan isu atau masalah publik yang ada. Sistematika/mechanisme kebijakan publik dimaksud adalah:

- a. Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni mendasar dan menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama. Biasanya berjangka panjang tidak bisa diselesaikan oleh orang perorang dan memang harus di selesaikan.
- b. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara.
- c. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintahan bersama-sama dengan masyarakat.
- d. Namun dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.

- e. Implementasi kebijakan bermuara kepada *output* yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
- f. Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut

Menurut Agustino (2006 : 6) mendefenisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Menurut Dun (2003 : 26) terdapat lima tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yaitu :

- a. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi yang tersembunyi, mengidentifikasi penyebab-penyebab, menetapkan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, merancang peluang-peluang kebijakan baru.

b. Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat diambilnya alternative, termasuk tidak melakukan sesuatu. Tahap ini disebut juga dengan tahap formulasi kebijakan.

c. Rekomendasi

Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestinasikan melalui peramalan, ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian mengenai eksternalitas dan akibat ganda.

d. Pemantauan

Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap implementasi kebijakan.

e. Evaluasi

Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan, jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan kebijakan publik pada umumnya di tujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. tindakan atau perbuatan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, sehingga apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka kebijakan publik tidaklah efektif.

2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mustopadijaja (2002 : 118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diterapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Dwijowijoto (2003 : 158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk

program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Winarno (2012 : 102) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Nurdin (2002 : 116) berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Tachjan (2006 : 25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Widodo (2011 : 96) mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu :

- a. Komunikasi

Komunikasi menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara

pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup).

b. Sumber daya

Sumber daya menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran.

c. Disposisi

Disposisi menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.

d. Struktur Birokrasi

Aspek struktur organisasi memiliki dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah memiliki *Standar Operation Procedur* (SOP). SOP merupakan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak lari dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Mulyono (2017 : 239) manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik lagi dan memadai bagi para peserta didik oleh karenanya gagasan MBS sering dipertimbangkan sebagai upaya memposisikan kembali peran sekolah yang sesungguhnya dalam konteks diatas, maka aspirasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah diakomodasikan dalam berbagai kepentingan yang ditujukan pada peningkatan kinerja sekolah antara lain direfleksikan pada rumusan visi, misi, tujuan dan program-program prioritas sekolah.

Mulyasa (2014 : 11) manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi yang ditunjukkan dengan pernyataan politik dalam garis-garis besar haluan negara. Hal tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan baik secara makro maupun mikro.

Depdiknas (2009 : 38) mengartikan MBS adalah model pengelola yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab) lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah dll) untuk

meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta perundang undangan yang berlaku.

Siahaan (2006 : 19) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai paradigma baru dalam menata ulang organisasi pendidikan, dijadikan sebagai tema dasar perubahan pendidikan, hal ini dilakukan agar efektivitas upaya memanusiakan manusia melalui persekolahan dengan berbagai kebijakannya, akan menghasilkan pola baru dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, dimana selama ini terabaikan secara sengaja.

Berdasarkan pendapat tersebut manajemen berbasis sekolah ialah memberikan otonomi atau kewenangan dan tanggung jawab lebih besar kepada sekolah, dan memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tuntutan sekolah serta masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat (1) menyatakan “Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

a). Kemandirian

Dalam Implementasi MBS sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kewenangan tersebut merupakan otonomi sekolah untuk mengelola (merencanakan, melaksanakan, dan

mengawasi/mengevaluasi) program sekolah, tanpa harus menunggu atau dibatasi petunjuk dari birokrasi pendidikan di atasnya. Pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah akan memberikan fleksibilitas dalam mengelola sumber dayanya secara optimal.

Pengertian kemandirian sekolah menurut Depdiknas (2009: 40) lebih ditekankan kepada kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri dengan tidak selalu tergantung kepada pihak lain. Kemandirian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/ evaluasi program sekolah merupakan tolok ukur kemandirian sekolah. Program sekolah yang dimaksudkan disini yaitu tentang standar pengelolaan dalam pemenuhan aspek-aspek standar nasional pendidikan (SNP). Program sekolah tersebut dikembangkan sendiri menjadi berbagai kegiatan dengan cakupan dan luasan sesuai dengan kondisi dan kemampuan sekolah.

Darma (2010 : 24) mengatakan bahwa kemandirian sekolah akan mampu berjalan dengan semestri apabila didukung oleh sejumlah kemampuan, seperti kemampuan mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan memecahkan persoalan sekolah, maupun kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk menjadi mandiri, sekolah harus memiliki sumberdaya yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya selebihnya yaitu peralatan, perlengkapan, perbekalan, dana, dan bahan/material.

Depdiknas (2009 : 59) menyatakan bahwa suatu sekolah dapat mandiri dalam pelaksanaan program jika didukung oleh sejumlah kemampuan SDM sekolah, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan

tuntutan program, didukung oleh sumber dana yang memadai sesuai dengan tuntutan program. Hal ini berarti bahwa sekolah yang mandiri dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan sumber daya sekolah tersebut, yang meliputi ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, dan ketersediaan dana sekolah sesuai dengan tuntutan program.

b). Kemitraan

Dalam pelaksanaan program sekolah diperlukan adanya masukan-masukan atau bantuan secara langsung dari para *stakeholder*. Namun demikian, adanya masukan atau bantuan dari para pemangku kepentingan tersebut tidak mengurangi prinsip dan makna kemandirian yang dibangun sekolah. Kemandirian dalam arti luas tetap menerima dan memerlukan kerjasama dengan pihak lain. Disamping itu, terdapat beberapa hal yang tidak bisa hanya ditangani oleh sekolah, sehingga kerjasama atau kemitraan tetap diperlukan.

Menurut Daryanto (2006 : 71), dalam dunia pendidikan dikenal dua macam hubungan, yakni: hubungan dalam penyelenggaraan program pendidikan dengan masyarakat sekolah, dan hubungan dengan masyarakat di luar sekolah. Hubungan dengan masyarakat sekolah dapat diartikan sebagai kerjasama antar warga sekolah (kerjasama internal). Hubungan dengan masyarakat di luar sekolah merupakan kerjasama antara sekolah dengan pihak luar sekolah (kerjasama eksternal). Kerjasama sekolah yang baik ditunjukkan oleh hubungan antar warga sekolah yang erat, hubungan sekolah dan masyarakat erat, serta adanya kesadaran bersama bahwa *output* program sekolah merupakan hasil *teamwork*.

Kemitraan/kerjasama penting untuk dilakukan karena disadari sepenuhnya bahwa hasil pendidikan sekolah merupakan hasil kolektif dari unsur-unsur terkait atau para pemangku kepentingan (stakeholders). Kemitraan yang dapat menghasilkan *teamwork* yang kompak, cerdas, dan dinamis akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan sekolah. Di dalam sekolah, terdapat sejumlah orang yang bekerja pada posisi dan peran masing-masing. Dari sudut pandang ini, sekolah adalah sebuah tim kerja (*teamwork*), sehingga *output* pendidikan di sekolah merupakan hasil kerjasama warga sekolah, bukan hasil individual. Karena itu, budaya kerjasama antar fungsi dalam sekolah dan antar individu dalam sekolah harus merupakan kebiasaan hidup sehari-hari warga sekolah.

c). Partisipasi

Depdiknas (2009: 43) menyatakan bahwa partisipasi adalah proses dimana *stakeholders* (warga sekolah dan masyarakat) terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengevaluasian pendidikan di sekolah. Partisipasi yang dimaksud merupakan penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis di sekolah, dimana warga sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan) dan masyarakat didorong untuk terlibat dalam memberikan dukungan secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang turut serta (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pendidikan, maka akan memiliki rasa

memiliki terhadap sekolah, sehingga akan bertanggung jawab dan berdedikasi untuk mencapai tujuan sekolah.

MBS mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik warga sekolah seperti guru, kepala sekolah, siswa, dan tenaga-tenaga kependidikan lainnya, maupun warga di luar sekolah seperti orang tua siswa, akademisi, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lain yang mewakili masyarakat yang diwadahi melalui komite sekolah.

Partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah telah diatur dalam suatu kelembagaan yang disebut dengan Komite Sekolah. Komite Sekolah diharapkan menjadi mitra sekolah yang dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah. Tugas dan fungsi Komite Sekolah antara lain mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Selain itu, Komite Sekolah juga dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah tentang kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah. Pendeknya, Komite Sekolah diharapkan berperan sebagai pendukung, pemberi pertimbangan, mediator dan pengontrol penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

d). Keterbukaan

Depdiknas (2001: 16) keterbukaan ini ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang dan sebagainya, yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat kontrol.

Sekolah adalah organisasi pelayanan yang diberi mandat oleh publik untuk menyelenggarakan pendidikan sebaik-baiknya. Mengingat sekolah adalah organisasi pelayanan publik, maka sekolah harus transparan kepada publik mengenai proses dan hasil pendidikan yang dicapai. Transparansi dicapai melalui kemudahan dan kebebasan publik untuk memperoleh informasi dari sekolah. Transparansi sekolah perlu ditingkatkan agar publik memahami situasi sekolah dan dengan demikian mempermudah publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Darma (2010: 72) upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam kerangka meningkatkan transparansi sekolah kepada publik antara lain melalui pendayagunaan berbagai jalur komunikasi, baik secara langsung melalui temu wicara, maupun secara tidak langsung melalui jalur media tertulis (brosur atau pengumuman melalui surat kabar) maupun media elektronik.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan sekolah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Keterbukaan sekolah ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan publik terhadap sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pendidikan

yang bersih dan berwibawa. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah dan publik melalui penyediaan informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbukaan sekolah ditunjukkan dengan selalu melibatkan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan sekolah sebagai alat kontrol. Sekolah yang terbuka merupakan sekolah yang memberikan kemudahan akses informasi kepada warga sekolah dan masyarakat terkait dengan apa saja yang dilakukan sekolah dengan mendayagunakan berbagai jalur komunikasi atau wadah informasi.

e). Akuntabilitas

Depdiknas (2009 : 45) menyampaikan bahwa akuntabilitas sekolah adalah pertanggungjawaban sekolah kepada warga sekolahnya, masyarakat, dan pemerintah melalui pelaporan dan pertemuan yang dilakukan secara terbuka. Dengan demikian, akuntabilitas sekolah adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

Manajemen berbasis sekolah dengan desentralisasi kewenangan kepada sekolah bukan hanya memberikan kewenangan untuk mengambil keputusan yang lebih luas (daripada sebelumnya), tetapi juga sekaligus membebaskan pertanggungjawaban oleh sekolah atas apa-apa yang dikerjakan dan hasil kerjanya. Akuntabilitas pendidikan dan hasilnya diberikan bukan hanya kepada satu *stakeholder* (pusat/birokrasi), tetapi kepada berbagai pihak (*stakeholders*), termasuk di dalamnya orang tua, komite sekolah (masyarakat), dan pengguna

lulusan, disamping secara internal kepada guru-guru dan warga sekolah. Akuntabilitas kepada berbagai pihak ini pada gilirannya akan meningkatkan kepedulian yang kuat (komitmen) pihak-pihak terkait tersebut atas apa yang terjadi di sekolah.

Tujuan utama akuntabilitas sekolah terhadap pelaksanaan program dan hasilnya adalah untuk mewujudkan sekolah yang akuntabel dan terpercaya. Keberhasilan akuntabilitas sekolah adalah ditandai dengan meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah. Dengan meningkatnya akuntabilitas sekolah, maka akan mewujudkan sekolah yang akuntabel dan terpercaya.

2.3 Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah

Menurut Depdiknas (2001 : 39) mendeskripsikan bahwa tujuan penerapan MBS adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian, dan inisiatif sekolah dalam mengelola serta memberdayakan sumber daya yang tersedia; meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama; meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya; serta meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

Menurut Mulyasa (2011 : 151) tujuan MBS yaitu ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respons pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu,

dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat. Kemudian, peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orangtua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Peningkatan pemerataan dapat diperoleh melalui peningkatan berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini dimungkinkan karena pada sebagian masyarakat tumbuh rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sekolah.

Sujanto (2009 : 122) tujuan penerapan MBS diharapkan dapat membuat sekolah lebih mandiri, dengan memberdayakan potensi sekolah melalui pemberian kewenangan lebih besar kepada sekolah (otonomi), dan mendorong sekolah untuk memulai mengambil keputusan secara partisipatif yang melibatkan warga sekolah dan pihak masyarakat yang dilayaninya (*stakeholders*). Pihak sekolah perlu membentuk komite sekolah dengan melibatkan masyarakat yang lebih luas.

Menurut Zazin (2017 : 103) Manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama di daerah, karena sekolah dan masyarakat tidak perlu menunggu perintah dari pusat, tetapi dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai dengan kondisi daerah dan melaksanakan visi pendidikan secara mandiri.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa tujuan MBS untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menjadikan sekolah yang mandiri dan berprestasi, selain itu meningkatkan kesadaran, kepedulian serta saling rasa memiliki terhadap perkembangan sekolah. Tujuan MBS berupaya untuk

memberdayakan potensi sekolah serta mendorong kegiatan manajemen sekolah yang menekankan pada kemandirian, kemitraan, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

2.4 Strategi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Mulyono (2010 : 240), bahwa keberhasilan MBS hendaklah melalui strategi sebagai berikut :

- a. sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal. Pertama, dimilikinya kekuasaan dan kewenangan. Kedua, pengembangan pengetahuan dan berkesinambungan. Ketiga, akses informasi ke segala bagian. Keempat, pemberian penghargaan kepada setiap orang yang berhasil.
- b. Adanya peran masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan dalam proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum dan instruksional serta non-instruksional.
- c. Adanya kepemimpinan kepala sekolah yang mampu menggerakkan dan mendayagunakan setiap sumber daya sekolah secara efektif.
- d. Adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah yang aktif.
- e. Semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh.
- f. Adanya *guidelines* (garis pedoman) dari departemen terkait sehingga mampu mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisien dan

efektif. *Guidlines* itu jangan sampai berupa aturan yang mengekang dan membelenggu sekolah.

- g. Sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal diwujudkan dalam laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

Data deskriptif ialah data indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diambil dari orang-orang atau subjek itu sendiri.

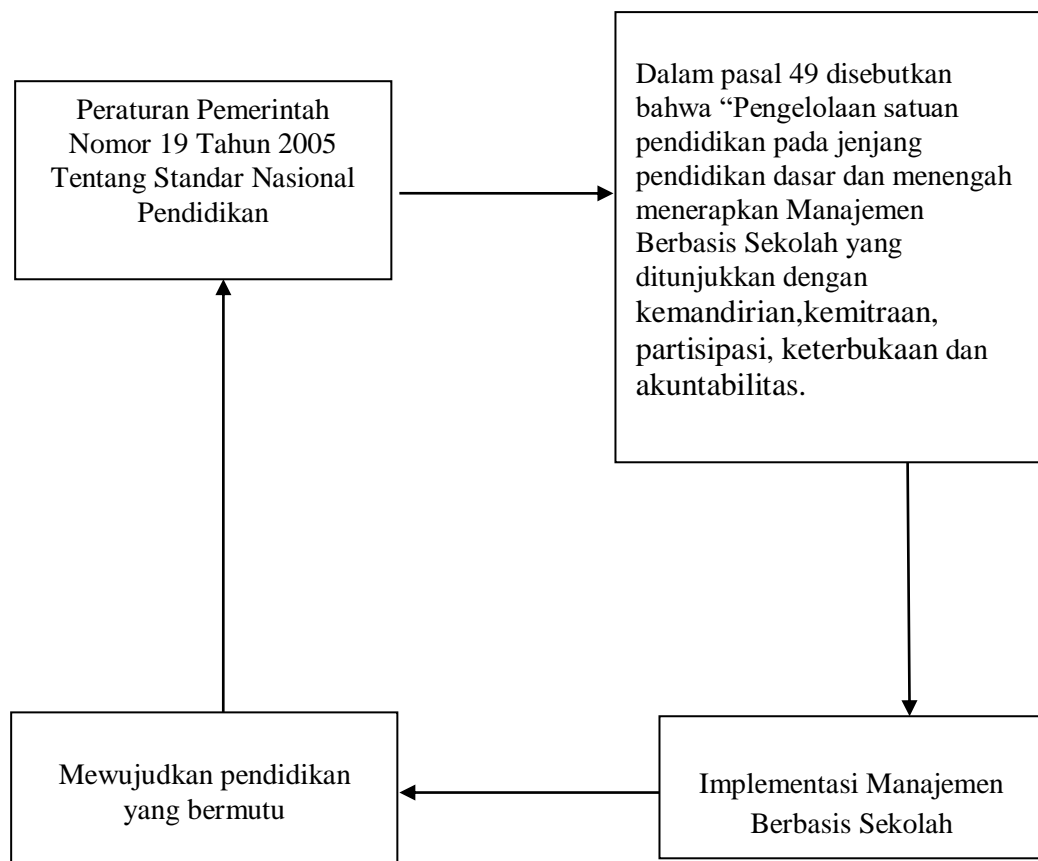
Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah.

Menurut Moleong (2007:103) sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat ditangkap maknanya yang tersirat dalam dokumen.

Arikunto (2010 : 10) mengatakan agar penelitian dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data dalam bentuk variabel atau kata-kata yang diucapkan secara lisan. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3.1



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak ; kejadian keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Implementasi merupakan berbagai pelaksanaan dari berbagai peraturan yang harus dilaksanakan demi mencapai hasil yang diharapkan yang berdampak baik kepada kehidupan kedepannya.
- b. Kebijakan adalah tindakan dari sejumlah aktor yang bertujuan untuk pemecahan masalah yang ada di kehidupan sosial masyarakat.
- c. Kebijakan publik merupakan intervensi pemerintah yang memiliki serangkaian tujuan dalam memberikan batasan-batasan di kehidupan sosial masyarakat agar tidak terjadi kesimpangan perilaku di dalam masyarakat.
- d. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu perundang-undangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu di dalam tatanan hidup masyarakat.
- e. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- f. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab) yang lebih luas kepada sekolah, dan memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tuntutan sekolah serta masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah.
- g. Mutu pendidikan merupakan tercapainya kualitas maupun kuantitas yang diharapkan agar masyarakat merasa puas.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya tujuan kebijakan peraturan pemerintah
- b. Adanya program yang dilaksanakan
- c. Adanya interaksi dengan organisasi lain
- d. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

3.5 Narasumber

Narasumber merupakan sumber data atau informasi penelitian atau orang yang menjadi sumber data atau informasi penelitian. Adapun kriteria narasumber adalah memiliki posisi penting di instansi yang bersangkutan dan mengetahui

dengan baik permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Blang Nisam

Nama : Zubaidah, S.Pd

Umur : 49 tahun

Pendidikan : S1

b. Tata Usaha/Operator SD Negeri 2 Blang Nisam

Nama : Tria Imelda, S.Pd

Umur : 26 tahun

Pendidikan : S1

c. Guru Kelas SD Negeri 2 Blang Nisam

Nama : Anita, S.Pd

Umur : 53 tahun

Pendidikan : S1

d. Guru Kelas SD Negeri 2 Blang Nisam

Nama : Nurdiana, S.Pd

Umur : 49 tahun

Pendidikan : S1

e. Komite Sekolah SD Negeri 2 Blang Nisam

Nama : Ramin

Umur : 46 tahun

Pendidikan : SMA

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulisan menggunakan teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu wawancara, mengartikan wawancara sebagai proses percakapan dengan maksud merekonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data, kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara di olah melalui kategorisasi. Dan kategorisasi yang didapatkan dirumuskan dan disimpulkan menjadi kesimpulan suatu penelitian yang diuraikan secara deskriptif dan analisis kualitatif.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang berguna dan bermanfaat dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah di SD Negeri 2 Blang Nisam yang beralamat Jalan Ujung Lebat desa Blang Nisam Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh Timur dan waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 2018 sampai dengan selesai.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat SD Negeri 2 Blang Nisam

Hampir sebagian besar orang tua berusaha mencari lembaga pendidikan yang kondusif terhadap anaknya terutama pendidikan dasar. Hal ini dilakukan karena pendidikan anak pada tingkat dasar menjadi bagian terpenting dalam proses perjalanan masa depan anak yang akan dijalani anak yang mampu menjawab segala tantangan zaman dan perkembangan Ilmu Pengentahuan dan teknologi yang akan datang. Namun dalam pencarian lembaga pendidikan tersebut, orang tua diharapkan dapat mempelajari dan melihat langsung keberadaan sekolah tersebut. Baik dari segi sarana, fasilitas, tujuan, kurikulum maupun tenaga pengajarnya.

SD Negeri 2 Blang Nisam yang berada di Jalan Ujung Lebat Kelurahan Blang Nisam Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh Timur dengan tanggal SK Operasional 01 Januari 1910, pada awal tahun berdirinya SDN 2 Blang Nisam ini dengan keadaan yang memprihatinkan sebab dulunya sekolah tersebut adalah kebun masyarakat sekitar sehingga saat di jadikan sekolah sekolah tersebut tidak sepenuhnya seperti sekolah biasa, lantai masih beralaskan tanah dan setiap kelas memiliki keadaan yang memprihatinkan. Setiap ruangan kelas berdindingkan kayu–kayu, sehingga kelas yang lain dapat melihat karena hanya di batasi oleh papan–papan kayu yang di susun rapi. Di lihat dari luar SDN 2 Blang Nisam hanyalah sekolah biasa seperti sekolah-sekolah lainnya, namun kalau di lihat dari dalam sangat memprihatinkan. Terkadang setiap hujan turun ada berapa kelas yang atapnya bocor sehingga keadaan belajar pun terganggu, sehingga saat itu di

buatlah jadwal sekolah untuk masuk pagi dan siang sehingga belajar dan mengajar pun tidak terganggu. Bangku dan meja setiap kelas sangatlah kurang sehingga murid-murid duduk di bangku panjang yang seharusnya untuk berdua namun dengan keadaan yang kurang dibuat tiga murid dalam satu bangku panjang. Pada tahun 1985 bantuan dari pemerintah pun datang sehingga satu persatu kelas dan lingkungan sekolah di perbaiki, mulai dari lantainya, atas kelas yang bocor, dinding sekolah, sampai papan tulis. Perubahan demi perubahan dibuat untuk sekolah SDN 2 Blang Nisam sehingga satu persatu murid datang untuk mendaftar di sekolah tersebut. Sehingga saat itu SDN 2 Blang Nisam memiliki murid yang cukup banyak di masa itu.

Tahun demi tahun di lalui namun keadaan sekolah terus memiliki perubahan Sekolah tersebut di perbaharui begitu pula kepala sekolahnya, setiap kepala sekolah memiliki visi dan misi untuk merubah sekolah tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya.

3.9.2 Visi dan Misi SD Negeri 2 Blang Nisam

Visi : Terwujudnya siswa/siswi yang berprestasi dan berakhlak mulia.

Misi :

- 1) Meningkatkan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien
- 2) Meningkatkan kegiatan dalam mencapai prestasi
- 3) Meningkatkan kegiatan belajar mengajar dengan intensif
- 4) Menjaga kelestarian lingkungan hidup sehat dan bersih
- 5) Membekali siswa dengan nilai-nilai keagamaan/keimanan
- 6) Menumbuh kembangkan minat baca siswa sehingga berprestasi.

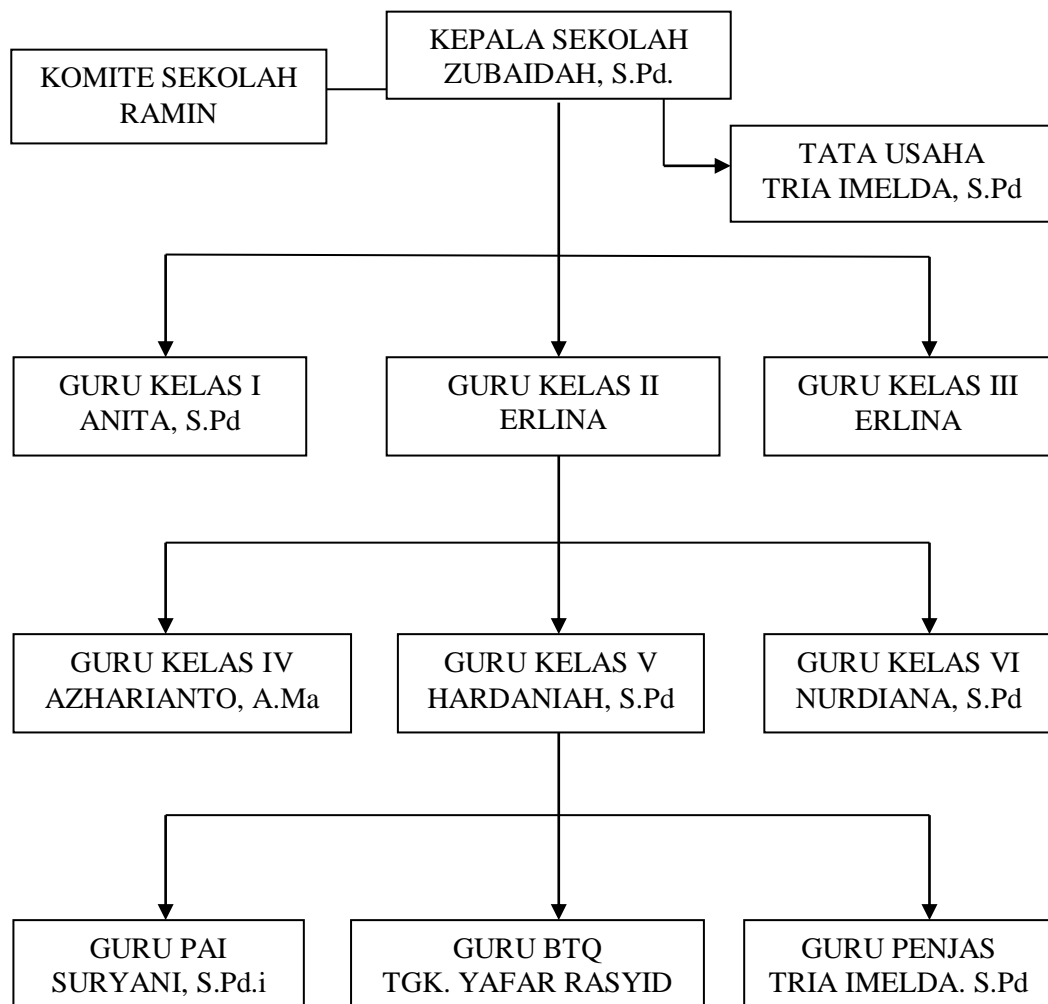
3.9.3 Struktur Organisasi

Gambar struktur organisasi SD Negeri 2 Blang Nisam :

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Sekolah SD Negeri 2 Blang Nisam Kecamatan Indra

Makmur Kabupaten Aceh Timur



3.9.4 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Sekolah

1. Kepala sekolah

Tugas pokok (Tupoksi) Kepala Sekolah yaitu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan sekolah, kepala sekolah juga berperan sebagai manager, edukator, pemimpin, motivator, dan juga inovator. Pelaksanaan rencana kerja, meliputi :

- a. Menyusun pedoman kerja
- b. Menyusun struktur organisasi sekolah
- c. Menyusun jadwal pelaksanaan kerja sekolah per semester dan tahunan
- d. Menyusun pengelolaan kesiswaan yang meliputi : melaksanakan penerimaan didik baru, memberikan layanan konseling kepada peserta didik, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk para peserta didik, melakukan pelacakan kepada alumni
- e. Menyusun KTSP, kalender pendidikan dan kegiatan pembelajaran
- f. Mengelola pendidik dan tenaga kependidikan
- g. Mengelola sarana dan prasarana
- h. Membimbing guru pemula
- i. Mengelola keuangan dan pembiayaan
- j. Mengelola budaya dan lingkungan sekolah
- k. Memberdayakan peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah

2. Komite Sekolah

Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Adapun peran dan fungsi komite sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai lembaga pemberian pertimbangan (advisory agency)
- b. Sebagai lembaga pendukung (supporting agency)
- c. Sebagai lembaga pengontrol (controlling agency)
- d. Sebagai mediator
- e. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
- f. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/orgaanisasi/dunia usaha dan dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu
- g. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
- h. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan.

3. Tata Usaha Sekolah

Tata usaha sekolah adalah bagian dari unit pelaksanaan teknis penyelenggaraan sistem administrasi dan informasi pendidikan di sekolah. Fungsi tata usaha adalah sebagai berikut :

- a. Perencana administratif program dan anggaran

- b. Koodinator administratif program
- c. Penyusun laporan program dan anggaran
- d. Pembina staf

Tugas tata usaha sebagai tenaga adminitrasi sekolah antara lain melaksanakan:

- a. Administrasi kepegawaian
- b. Administrasi keuangan
- c. Administrasi sarana dan prasarana
- d. Administrasi kehumasan
- e. Administrasi persuratan dan kearsipan
- f. Administrasi kesiswan
- g. Administrasi layanan khusus
- h. Administrasi informasi dan komunikasi

4. Guru

Guru adalah sebagai sosok teladan, sosok yang dipuji dan ditiru sudah sewajarnya jika selalu ingat akan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi sebagai seorang guru, dengan demikian ketika seorang guru senantiasa memperhatikan, mengingat dan menjalankan apa yang menjadi tupoksinya maka ia berhak menyandang gelar guru profesional. Berkaitan dengan pendidikan di lembaga sekolah, ada 3 tugas pokok guru dalam pendidikan, antara lain :

- a. Mengajar

Yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Mentransfer sejumlah ilmu pengetahuan kepada siswa sesuai disiplin ilmu yang diasuh.

b. Mendidik

Yaitu tugas ini berkaitan dengan sikap dan tingkah laku yang baik.

Bagaimana mengubah sikap siswa ke arah yang lebih baik.

c. Melatih

Saat mengajar dan mendidik, maka saat itu pula dapat dilaksanakan tugas guru sebagai pelatih. Melatih dengan berbagai kemampuan dasar yang di butuhkan oleh peserta didik. Adapun tupoksi atau tugas pokok dan fungsi seorang guru , antara lain :

- a. Membuat program pengajaran (silabus, rpp, prota, promes)
- b. Menganalisa materi pelajaran
- c. Membuat lembar kerja siswa (lks)
- d. Membuat program harian/jurnal belajar
- e. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
- f. Melaksanakan kegiatan penilaian baik itu ulangan harian, tengah semester atau akhir semester.
- g. Melaksanakan analisis ulangan, program remedial, pengayaan
- h. Mengisi daftar nilai siswa, mengisi rapot
- i. Melaksanakan bimbingan kelas/konseling
- j. Melaksanakan kegiatan bimbingan guru/tutor sebaya apabila telah mengikuti pelatihan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data ini diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu : Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Blang Nisam, Tata Usaha SD Negeri 2 Blang Nisam, Guru Sekolah Dasar Negeri 2 Blang Nisam dan Komite Sekolah di SD Negeri 2 Blang Nisam.

4.1.1 Keadaan atau Gambaran SD Negeri 2 Blang Nisam

Data tentang keadaan atau gambaran di Sekolah Dasar Negeri 2 Blang Nisam adalah dikelompokkan dalam fasilitas sekolah dan status sekolah. Adapun keadaan atau gambaran di Sekolah Dasar Negeri 2 Blang Nisam terkait dengan fasilitas sekolah antara lain disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Fasilitas Sekolah yang ada di Sekolah Dasar Negeri 2 Blang Nisam

Fasilitas	Jumlah
Ruang kelas belajar	6
Ruang Guru	1
UKS	-
Perpustakaan	-
Kantin	1
Labor Komputer	-

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Adapun status SD Negeri 2 Blang Nisam dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Status SD Negeri 2 Blang Nisam Kabupaten Aceh Timur

No	Status	Jawaban
1	Naungan	Kementerian pendidikan dan kebudayaan
2	MBS	Diterapkan
3	Nomor pokok Sekolah Nasional (NPSN)	10110387
4	Status	Negeri
5	Tanggal SK Izin Operasional	1910-01-01
6	Tanggal SK Pendirian	1982-01-01

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

4.1.2 Data Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di SD Negeri 2 Blang Nisam penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

1.2.1 Adanya tujuan kebijakan peraturan pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 14 Februari 2019 dengan Ibu Zubaidah, S.Pd (49 tahun) selaku kepala sekolah SD Negeri 2 Blang Nisam mengatakan bahwa tujuan dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah belum tercapai. Proses pengelolaan guru belum dilaksanakan secara maksimal. Yang sudah dilakukan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat agar masyarakat percaya kepada sekolah, membuat laporan pertanggungjawaban sekolah dan melaksanakan pengembangan

kurikulum. Adapun kendala yang dihadapi yaitu lemahnya pemahaman tenaga pendidik dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Ibu Tria Imelda, S.Pd. (26 tahun) selaku tata usaha di SD Negeri 2 Blang Nisam beliau mengatakan bahwa tujuan dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah belum tercapai. Yang sudah dilakukan dalam penerapan MBS oleh pihak sekolah dengan membuat laporan pertanggungjawaban, meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjalankan pengembangan kurikulum. Adapun kendala yang dihadapi yaitu lemahnya pemahaman guru dan kepala sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Ibu Anita, S.Pd. (53 tahun) selaku guru di SD Negeri 2 Blang Nisam beliau mengatakan tujuan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah belum tercapai. Yang sudah dilakukan dalam penerapan MBS oleh pihak sekolah dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi yaitu lemahnya pemahaman guru dan kepala sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 dengan Ibu Nurdiana, S.Pd (49 tahun) selaku guru di SD Negeri 2 Blang Nisam beliau mengatakan tujuan dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah belum tercapai, dalam penerapan manajemen berbasis sekolah ingin memberikan wewenang yang lebih besar bagi sekolah. Yang sudah dilakukan dalam penerapan MBS oleh pihak sekolah dengan membuat laporan pertanggungjawaban, dan

meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi yaitu lemahnya pemahaman guru dan kepala sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari jumat 15 february 2019 dengan Bapak Ramin (46 tahun) selaku komite sekolah di SD Negeri 2 Blang Nisam beliau mengatakan tujuan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah kemungkinan belum tercapai. Yang sudah dilakukan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah disiplin guru-guru disekolah. Adapun kendala yang dihadapi yaitu lemahnya pemahaman warga sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Dengan demikian disimpulkan bahwa tujuan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah belum tercapai sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan masih terjadi kendala dalam penerapan peraturan pemerintah tersebut. Adapun kendala yang dihadapi yaitu lemahnya pemahaman guru dan kepala sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah.

2.2.1 Adanya program yang dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 14 Februari 2019 dengan Ibu Zubaidah, S.Pd (49 tahun) selaku kepala sekolah SD Negeri 2 Blang Nisam beliau mengatakan bahwa program dalam kemandirian sekolah yaitu kewenangan kurikulum saat ini sekolah memakai Kurikulum 2013, terkait pemenuhan guru disekolah ini masih kekurangan satu guru kelas, dan sarana prasarana disekolah kita sedang usahakan agar terpenuhi. Dalam partisipasi kita membentuk wadah masyarakat yang disebut dengan komite sekolah guna

meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi partisipasi masyarakat tetap lemah. Pada keterbukaan sekolah, pihak sekolah jarang melaksanakan rapat yang berkenaan dengan informasi terkait program sekolah. Adapun akuntabilitas sekolah, sekolah membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) misalnya laporan dana BOS itu akan dilaporkan ke pihak dinas pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Ibu Tria Imelda, S.Pd (26 tahun) selaku tata usaha di SD Negeri 2 Blang Nisam beliau mengatakan bahwa program dalam kemandirian sekolah dalam kewenangan kurikulum saat ini sekolah memakai Kurikulum 2013, terkait pemenuhan guru disekolah ini terjadi kekosongan satu guru kelas yaitu di kelas dua, dan sarana prasarana disekolah belum terpenuhi terlihat dengan tidak adanya perpustakaan dan UKS. Dalam partisipasi, komite sekolah diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi dilapangan komite sekolah tidak memberikan dukungan dana dan dukungan fasilitas. Pada keterbukaan sekolah, pihak sekolah jarang melaksanakan rapat yang berkenaan dengan informasi terkait program sekolah. Adapun akuntabilitas sekolah, sekolah membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) misalnya laporan dana BOS itu akan dilaporkan ke pihak dinas pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Ibu Anita, S.Pd. (53 tahun) selaku guru di SD Negeri 2 Blang Nisam beliau mengatakan bahwa kemandirian sekolah dalam kewenangan kurikulum saat ini sekolah memakai Kurikulum 2013, sebelum diterapkan MBS masih menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), terkait pemenuhan

guru disekolah ini masih kekurangan satu guru di kelas dua, untuk menghindari kekosongan guru yang lain secara bergantian mengajar dikelas tersebut agar dikelas tersebut masih melaksanakan proses belajar mengajar dan sarana prasarana disekolah belum memadai. Dalam partisipasi kita membentuk wadah masyarakat yang disebut dengan komite sekolah guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada keterbukaan sekolah, pihak sekolah jarang melaksanakan rapat yang terkait dengan program sekolah. Adapun akuntabilitas sekolah, sekolah membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) misalnya laporan dana BOS itu akan dilaporkan ke pihak dinas pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 14 Februari 2019 dengan Ibu Nurdiana, S.Pd (49 tahun) selaku guru di SD Negeri 2 Blang Nisam beliau mengatakan bahwa kemandirian sekolah dalam kewenangan kurikulum saat ini sekolah memakai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2013, guru disekolah ini masih kekurangan satu guru kelas, dan sarana prasarana belum terpenuhi. Dalam partisipasi sekolah membentuk wadah masyarakat yang disebut dengan komite sekolah guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada keterbukaan sekolah, pihak sekolah jarang melaksanakan rapat yang berkenanan dengan informasi terkait program sekolah. Adapun akuntabilitas sekolah, sekolah membuat laporan pertanggung jawaban ke pihak dinas pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari jumat 15 Februari 2019 dengan Bapak Ramin (46 tahun) selaku komite sekolah di SD Negeri 2 Blang Nisam beliau mengatakan bahwa kemandirian disekolah saat ini cukup mandiri karena pihak sekolah mengurus urusannya sendiri. Dalam partisipasi, kepala sekolah

meminta satu perwakilan masyarakat untuk dijadikan komite sekolah agar adanya partisipasi masyarakat. Pada keterbukaan sekolah, pihak sekolah tidak sering mengadakan rapat yang berkenaan dengan informasi terkait program sekolah. Adapun akuntabilitas sekolah, sekolah membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) misalnya laporan dana BOS.

Dengan demikian disimpulkan bahwa pelaksanaan kemandirian disekolah belum maksimal hal ini terlihat disekolah masih kekurangan guru dan sarana prasarana yang belum terpenuhi. Dalam pelaksanaan partisipasi sekolah membentuk wadah masyarakat yaitu komite sekolah guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun pelaksanaan keterbukaan belum dilaksanakan dengan maksimal dan pelaksanaan akuntabilitas sekolah dengan membuat laporan pertanggungjawaban sekolah.

3.2.1 Adanya interaksi dengan organisasi lain

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 14 Februari 2019 dengan Ibu Zubaidah, S.Pd (49 tahun) selaku kepala sekolah SD Negeri 2 Blang Nisam beliau mengatakan kerjasama itu jadi gini ada internal dan eksternal. Kerjasama internal disekolah saya pikir baik baik saja gak ada masalah. Saya melihat saling bersinergi satu sama lain dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sedangkan kerjasama eksternal itu dengan pengawas dan dinas pendidikan. Dengan dinas pendidikan melalui berbagai kegiatan rapat dinas dan sinkronisasi program dinas dengan program sekolah. Hal ini untuk menjalin komunikasi antara sekolah dengan dinas, sehingga program dinas tidak mengganggu program sekolah dan juga sebaliknya.

Dengan pengawas yaitu pembinaan, pemantauan hingga penilaian terhadap pengembangan sekolah dan membantu sekolah dalam melakukan kegiatan bersama seperti *tryout* dan lomba cerdas cermat. Adapun kendala dalam pelaksanaan kerjasama adalah kegiatan-kegiatan kurang direncanakan kurang baik, sehingga pemberituannya mendadak dan jarak dinas pendidikan yang lumayan jauh.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Ibu Tria Imelda, S.Pd (26 tahun) selaku tata usaha di SD Negeri 2 Blang Nisam beliau mengatakan bahwa kemitraan yang terjalin di sekolah biasanya sebelum awal tahun ajaran guru-guru berkumpul bersama mengadakan rapat kerja. Dengan pihak dinas pendidikan biasanya yang menyangkut hal administratif misal pemberkasan dan program sekolah. Dengan pengawas yaitu pembinaan, pemantauan hingga penilaian terhadap pengembangan sekolah dan membantu sekolah dalam melakukan suatu kegiatan. Adapun kendala yang dihadapi yaitu jarak yang jauh antara sekolah dengan dinas pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Ibu Anita., S.Pd. (53 tahun) selaku guru di SD Negeri 2 Blang Nisam beliau mengatakan bahwa kemitraan yang terjalin di sekolah biasanya sebelum awal tahun ajaran guru-guru berkumpul bersama mengadakan rapat kerja. Dengan pihak dinas pendidikan biasanya yang menyangkut hal administratif misal pemberkasan dan program sekolah. Saya sebagai guru mengetahui informasi pada dinas pendidikan dari kepala sekolah karena kepala sekolah biasanya mendapatkan informasi yang lebih cepat. Selain dengan dinas pendidikan sekolah

juga menjalin kemitraan dengan pengawas. Adapun kendala yang dihadapi yaitu jarak yang jauh antara sekolah dengan dinas pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 dengan ibu Nurdiana, S.Pd (49 tahun) selaku guru di SD Negeri 2 Blang Nisam beliau mengatakan bahwa kemitraan pada sekolah terlihat dari kegiatan rapat dan koordinasi antar unit kerja. Dengan pihak dinas pendidikan biasanya yang terkait dengan pemberkasan, kenaikan pangkat dan sebagainya. Untuk mendapatkan informasi yang bersumber dari dinas kami sebagai guru melalui kepala sekolah. Selain kemitraan dengan dinas pendidikan sekolah juga menjalin kemitraan dengan pengawas yaitu pembinaan, pemantauan hingga penilaian terhadap pengembangan sekolah dan membantu sekolah. Adapun kendala yang terjadi yaitu jarak antara dinas pendidikan dan sekolah yang lumayan jauh.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 15 Februari 2019 dengan Bapak Ramin (46 tahun) selaku komite sekolah di SD Negeri 2 Blang Nisam beliau mengatakan bahwa kemitraan pada sekolah yaitu guru dengan guru yang lainnya, kerjasama di sekolah cukup baik. Dengan pihak dinas pendidikan biasanya itu urusan kepala sekolah ya, kalau saya sebagai komite sekolah tidak mengetahui bagaimana kerjasama yang dilakukan pihak sekolah dengan dinas pendidikan. Adapun kendala yang terjadi yaitu jarak antara dinas pendidikan dan sekolah yang lumayan jauh.

Dengan demikian disimpulkan bahwa interaksi di sekolah yaitu kepala sekolah mendapatkan informasi melalui rapat dinas dan guru mendapat informasi yang diberikan dinas pendidikan melalui kepala sekolah. Kemitraan sekolah yang

ada saat ini dengan pengawas dan dinas pendidikan, dengan dinas pendidikan melalui berbagai kegiatan rapat dinas dan sinkronisasi program dinas dengan program sekolah. Hal ini untuk menjalin komunikasi antara sekolah dengan dinas, sehingga program dinas tidak mengganggu program sekolah dan juga sebaliknya. Dengan pengawas yaitu pembinaan, pemantauan hingga penilaian terhadap pengembangan sekolah dan membantu sekolah dalam melakukan kegiatan bersama seperti *tryout* dan lomba cerdas cermat. Namun saat ini dalam pelaksanaannya masih terjadi kendala. Adapun kendala dalam pelaksanaan kemitraan adalah jarak dinas pendidikan dengan sekolah yang lumayan jauh.

4.2.1 Adanya pedoman atau aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 14 Februari 2019 dengan Ibu Zubaidah, S.Pd (49 tahun) selaku kepala sekolah SD Negeri 2 Blang Nisam beliau mengatakan dalam pelaksanaan pedoman penerapan manajemen berbasis sekolah di sekolah ini sudah dijalankan semaksimal mungkin dan sudah diterapkan oleh pihak sekolah. Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah ini terdapat hambatan yaitu kurangnya sosialisasi yang diberikan dinas pendidikan. Adapun saran beliau agar pedoman dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan harus di sosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Ibu Tria Imelda.,S.Pd (26 tahun) selaku tata usaha di SD Negeri 2 Blang

Nisam beliau mengatakan dalam pelaksanaan pedoman penerapan manajemen berbasis sekolah di sekolah ini sudah dijalankan semaksimal mungkin tetapi dalam hal penerapan manajemen berbasis sekolah memang belum dijalankan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Dalam pelaksanaan penerapan manajemen berbasis sekolah ini terdapat hambatan yaitu tidak adanya sosialisasi dari dinas pendidikan. Adapun saran beliau agar pedoman dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan haruslah disosialisasikan terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Ibu Anita, S.Pd. (53 tahun) selaku guru di SD Negeri 2 Blang Nisam beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pedoman penerapan manajemen berbasis sekolah di sekolah ini sudah dijalankan semaksimal mungkin tetapi dalam hal penerapan manajemen berbasis sekolah memang belum dijalankan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Dalam pelaksanaan penerapan manajemen berbasis sekolah ini terdapat hambatan yaitu tidak adanya sosialisasi dari dinas pendidikan ke pihak sekolah. Adapun saran beliau agar pedoman dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan harus disosialisasikan kepada pihak sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 14 Februari 2019 dengan Ibu Nurdian, S.Pd (49 tahun) selaku guru di SD Negeri 2 Blang Nisam beliau menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pedoman penerapan manajemen berbasis sekolah di sekolah ini sudah dijalankan semaksimal mungkin tetapi dalam hal penerapan manajemen berbasis sekolah memang belum dijalankan

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Dalam pelaksanaan penerapan manajemen berbasis sekolah ini terdapat hambatan yaitu tidak adanya sosialisasi dari dinas pendidikan. Adapun saran beliau agar pedoman dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka dinas pendidikan harus mensosialisasikan peraturan kebijakan ke sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari jumat 15 Februari 2019 pukul dengan Bapak Ramin (46 tahun) selaku komite sekolah di SD Negeri 2 Blang Nisam beliau mengatakan bahwa dalam pedoman penerapan manajemen berbasis sekolah di sekolah mungkin sudah dijalankan, tetapi dalam hal penerapan manajemen berbasis dari pihak kepala sekolah memang belum mensosialisasikan tentang kebijakan itu kepada komite sekolah. Dalam pelaksanaan penerapan manajemen berbasis sekolah ini terdapat hambatan yaitu tidak adanya sosialisasi dari kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah. Adapun saran beliau agar pedoman dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan harus disosialisasikan terlebih dahulu.

Dengan demikian dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penerapan manajemen berbasis sekolah di SD Negeri 2 Blang Nisam menggunakan pedoman peraturan menteri nomor 19 tahun 2005 tetapi belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan adanya kendala yaitu tidak adanya sosialisasi dari dinas pendidikan ke pihak sekolah dan tidak adanya sosialisasi dari kepala sekolah ke komite sekolah terkait peraturan pemerintah dalam penerapan manajemen berbasis sekolah.

4.2 Pembahasan

Dalam pembahasan ini, hasil wawancara yang ada akan dianalisis dan menginterpretasikannya dengan konsep atau teori yang telah diuraikan. Adapun analisis terhadap hasil wawancara yang penulis sajikan, sebagai berikut :

4.2.1 Adanya tujuan kebijakan peraturan pemerintah

Wahab (2005 : 135) bahwa implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di SD Negeri 2 Blang Nisam, bahwa tujuan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah belum tercapai. Yang sudah dilakukan dalam penerapan MBS oleh pihak sekolah dengan membuat laporan pertanggungjawaban, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan membentuk komite sekolah dan menjalankan pengembangan kurikulum.

Dari hasil analisis penulis, tujuan yang ingin dicapai dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dalam penerapan manajemen berbasis sekolah di SD Negeri 2 Blang Nisam belum sepenuhnya tercapai. Adapun yang menjadi kendala dalam penerapan manajemen berbasis yaitu lemahnya pemahaman guru dan kepala sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah.

4.2.2 Adanya program yang dilaksanakan

Menurut Dwijowijoto (2003 :158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di SD Negeri 2 Blang Nisam, diketahui bahwa program dalam manajemen berbasis sekolah terkait kemandirian sekolah yaitu dalam kewenangan kurikulum sudah diterapkan, terkait pemenuhan guru, sekolah ini masih kekurangan satu guru kelas, dan sarana prasarana belum terpenuhi. Dalam partisipasi, sekolah membentuk wadah masyarakat yang disebut dengan komite sekolah guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada keterbukaan sekolah, pihak sekolah jarang melaksanakan rapat yang berkenaan dengan informasi terkait program sekolah. Pada akuntabilitas sekolah, sekolah membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ).

Dari hasil analisis penulis, program yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Blang Nisam masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hasil pengamatan ini didukung dengan beberapa pendapat responden pada program dalam kemandirian sekolah yang belum baik, karena sekolah masih mengalami kekurangan satu orang guru dan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi. Partisipasi sekolah masih lemah walaupun sudah dibentuk komite sekolah. Pada keterbukaan sekolah juga belum dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat pihak sekolah jarang melaksanakan rapat yang berkenaan dengan informasi terkait

program sekolah. Tetapi pada akuntabilitas sekolah sudah cukup baik dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang akan dilaporkan ke dinas pendidikan.

4.2.3 Adanya interaksi dengan organisasi lain

Menurut Guntur (2004 : 39) implementasi adalah suatu perluasan yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di SD Negeri 2 Blang Nisam, interaksi yang ada pada sekolah yaitu dengan dinas pendidikan dan pengawas. Dengan dinas pendidikan melalui berbagai kegiatan rapat dinas dan sinkronisasi program dinas dengan program sekolah. Hal ini untuk menjalin komunikasi antara sekolah dengan dinas, sehingga program dinas tidak mengganggu program sekolah dan juga sebaliknya. Dengan pengawas yaitu pembinaan, pemantauan hingga penilaian terhadap pengembangan sekolah dan membantu sekolah dalam melakukan kegiatan bersama seperti *tryout* dan lomba cerdas cermat.

Dari hasil analisis penulis, interaksi dengan organisasi lain belum maksimal, hal ini terlihat masih kurangnya kerjasama yang dilakukan pihak sekolah, kerjasama yang dilakukan pihak sekolah yaitu dengan pengawas dan dinas pendidikan. Tidak ada kerjasama dengan pihak perusahaan atau lembaga yang lain, yang seharusnya dapat memberikan bantuan dana kepada sekolah. Kerjasama dengan dinas pendidikan melalui berbagai kegiatan rapat dinas dan sinkronisasi program dinas dengan program sekolah. Dengan pengawas yaitu pembinaan, pemantauan hingga penilaian terhadap pengembangan sekolah dan

membantu sekolah dalam melakukan kegiatan bersama seperti *tryout* dan lomba cerdas cermat.. Namun masih ada kendala yang dihadapi yaitu Adapun kendala yang dihadapi yaitu jarak antara dinas pendidikan dan sekolah yang lumayan jauh.

Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah, interaksi sangat penting yang akan menimbulkan kemitraan atau kerjasama untuk keberhasilan pencapaian tujuan sekolah dan dilakukan karena hasil pendidikan sekolah merupakan hasil kolektif dari unsur-unsur terkait atau para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4.2.4 Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

Menurut Adisasmita (2011 : 77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparat pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di SD Negeri 2 Blang Nisam, pedoman penerapan manajemen berbasis sekolah di sekolah ini sudah dijalankan semaksimal mungkin dan sudah diterapkan oleh pihak sekolah. Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah ini terdapat hambatan yaitu tidak adanya sosialisasi dari dinas pendidikan. Adapun saran dalam pelaksanaan agar pedoman dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan harus disosialisasikan terlebih dahulu.

Dari hasil analisis penulis, pelaksanaan pedoman penerapan manajemen berbasis sekolah di sekolah ini sudah dijalankan semaksimal mungkin dan sudah

diterapkan oleh pihak sekolah. Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah ini terdapat hambatan yang terjadi yaitu tidak adanya sosialisasi dari dinas pendidikan ke pihak sekolah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Di SD Negeri 2 Blang Nisam belum terlaksana dengan baik, dikarenakan belum tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Pertama, tujuan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dalam penerapan manajemen berbasis sekolah belum sepenuhnya dijalankan atau dilaksanakan di SD Negeri 2 Blang Nisam sehingga tujuan manajemen berbasis sekolah belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan lemahnya pemahaman guru dan kepala sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Kedua, program yang dilaksanakan dalam kemandirian sekolah belum maksimal, karena sekolah masih mengalami kekurangan satu orang guru dan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi. Partisipasi sekolah masih lemah walaupun sudah dibentuk komite sekolah. Pada keterbukaan sekolah belum dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat pihak sekolah jarang melaksanakan rapat yang berkenaan dengan informasi terkait program sekolah. Tetapi pada akuntabilitas sekolah sudah cukup baik dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan ke dinas pendidikan.

Ketiga, interaksi dengan organisasi lain belum maksimal, hal ini terlihat masih kurangnya kerjasama yang dilakukan pihak sekolah, kerjasama yang dilakukan pihak sekolah yaitu dengan pengawas dan dinas pendidikan. Tidak ada kerjasama dengan pihak perusahaan atau lembaga yang lain, yang seharusnya dapat memberikan bantuan dana kepada sekolah. Kerjasama dengan dinas pendidikan melalui berbagai kegiatan rapat dinas dan sinkronisasi program dinas dengan program sekolah. Dengan pengawas yaitu pembinaan, pemantauan hingga penilaian terhadap pengembangan sekolah dan membantu sekolah dalam melakukan kegiatan bersama seperti *tryout* dan lomba cerdas cermat. Namun masih ada kendala yang dihadapi yaitu Adapun kendala yang dihadapi yaitu jarak antara dinas pendidikan dan sekolah yang lumayan jauh.

Keempat, pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah di SD negeri 2 Blang Nisam sudah dijalankan semaksimal mungkin dan sudah diterapkan oleh pihak sekolah. Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah ini terdapat hambatan yang terjadi yaitu tidak adanya sosialisasi dari dinas pendidikan ke pihak sekolah.

5.2 Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 5.2.1 Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 di Sekolah Dasar Negeri 2 Blang Nisam, sekolah hendaknya meningkatkan pemahaman seluruh elemen sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah.

- 5.2.2 Diharapkan pihak Dinas Pendidikan melaksanakan sosialisasi tentang manajemen berbasis sekolah agar elemen sekolah lebih dapat memahami dari kebijakan yang dibuat pemerintah dan dapat diterapkan di sekolah.
- 5.2.3 Seharusnya Sekolah harus membuat tindakan agar terpenuhinya tenaga pendidik dan terpenuhinya sarana dan prasana untuk menunjang proses pembelajaran. Selain itu, kerjasama dengan pihak terkait agar lebih diintensifkan sehingga sekolah bisa mendapatkan bantuan dana dari perusahaan atau lembaga selain pemerintah.
- 5.2.4 Sekolah hendaknya lebih meningkatkan lagi keterlibatan atau partisipasi seluruh elemen sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, leo. 2006 . *Politik Dan Kebijakan Publik*,. Bandung: AIPI.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Daryanto. 2006. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darma, Surya. 2010. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Depdiknas. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Buku I Konsep dan Pelaksanaan*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Depdiknas.
- , 2009. *Manajemen Berbasis Sekolah dalam Kerangka Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Mandikdasmen.
- Dunn, Wiliam N. 2003 : *Pengantar Analisis Kebijakan*, Gajah Mada University Press, Jakarta.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Kaputindo. Jakarta.
- Dye, Thomas R. 2005 : *Kebijakan Dan Kebijakan Publik*, Rosdakarya, Bandung.
- Guntur, Setiawan. 2004. *Implementasi Kebijakan dan politik*. Bandung: Remaja Rosdakarya offset.
- Moleong. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Mandar Maju.
- Mulyono. 2010. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- , 2017. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Mustopadijaja. 2002. *Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Cendana Kencana Sentosa.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta

- Mulyasa. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi, dan Implementasi)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- , 2014. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarata: PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, dkk. 2006. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Banten: Ciputat Press Group.
- Solly. 2007 : *Kebijakan Publik*. Bandung: Maju Mundur.
- Sujanto, Bedjo. 2009. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah*. Jakarta : Sagung Seto.
- Tachjan. 2006 : *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- , 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2014. *Analisis kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2010. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Caps.
- , 2012 : *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Caps.
- Zazin, Nur. 2017. *Gerakan Menata Mutu Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.
- <https://silabus.org/tupoksi/amp>

RIWAYAT HIDUP

Nama : Sindi Wiranda
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Timur, 15 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Seser No 68 Kecamatan Medan Tembung
Nama Orang Tua
Nama Ayah : Wanto
Nama Ibu : Anita
Alamat : SP 1 AIM VI Kec. Indra Makmu Kab. Aceh Timur
Pendidikan
1. Tahun 2003-2009 : SDN 054912 KW Besilam
2. Tahun 2009-2012 : SMP Negeri 1 Indra Makmur
3. Tahun 2012-2015 : SMA Negeri 1 Indra Makmur
4. Tahun 2015 sampai dengan sekarang tercatat sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 18 Maret 2019

Sindi Wiranda



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Sindi Wiranda
N P M : 1503100152
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SD Negeri 2 Blang Nisam.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	11-03-2019	Bimbingan proposal	
2.	13-03-2019	Bimbingan Draft wawancara	
3.	15-03-2019	Latihan kutipan (bab I)	
4.	15-03-2019	Uraian teori (bab II)	
5.	18-03-2019	Tambahan referensi	
6.	20-03-2019	Isi bab kerangka konsep dan tambahan struktur organisasi	
7.	27-03-2019	Bab II Pembahasan hasil penelitian	
8.	01-03-2019	Revisi & uji	

Medan, 06 Maret 2019...

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke :

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.S.P)

(NAILIL KHAIRIAH, S.Pd., M.Pd)

(IDA MARTINELLI, S.H., M.M)

